

UPAYA TIONGKOK MEMENUHI KEBUTUHAN ENERGI NASIONAL MELALUI SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION (SCO)

Didang Alexander - 071311233063
Universitas Airlangga

Abstrak

Berkembangnya jaman menjadi era industrialisasi memaksa negara untuk memperbesar industri di negaranya. Untuk memenuhi kebutuhan energi bagi penggunaan industri dalam negeri, negara secara tidak langsung dituntut dapat menyediakan kebutuhan energi bagi industri tersebut. Tiongkok yang hadir sebagai negara superpower baru sebagai pesaing Amerika, mengalami industrialisasi besar-besaran di negaranya. Seiring dengan hal tersebut, tentunya pemerintah Tiongkok memerlukan pasokan energi yang lebih dari negara lain. Salah satu sumber energi potensial berada di wilayah Asia Tengah, tetapi wilayah ini memiliki hambatan-hambatan seperti kemudahan dalam akses kontrol energi, mendorong stabilitas harga, dan tingginya cost dalam mengkesplorasi energi. Berangkat dari permasalahan ini, Tiongkok menggunakan Shanghai Cooperation Organization (SCO) sebagai organisasi regional yang didalamnya tergabung Tiongkok, Rusia, dan negara-negara Asia Tengah, menjadi wadah pemenuhan energi nasional Tiongkok yang diperoleh melalui kerjasama-kerjasama yang terjalin didalamnya melalui wadah organisasi regional SCO. Dengan menggunakan kerangka berpikir bahwa Tiongkok menggunakan organisasi regional SCO sebagai wadah untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang ada, maka hipotesis yang diajukan adalah Tiongkok menggunakan SCO sebagai wadah untuk pemenuhan kebutuhan energi nasionalnya. Jangkauan penelitian ini ketika ketika pergeseran kerjasama SCO yang berawal dari kerjasama militer menjadi fokus dalam sektor ekonomi yaitu pada KTT ketiga Shanghai Five pada tahun 1998 hingga berkontribusinya SCO sebagai wadah pemenuhan energi Tiongkok yaitu pada KTT SCO keenam pada tahun 2007.

Kata kunci: SCO, organisasi regional, Tiongkok, Asia Tengah, Energy Security

Tiongkok menjadi konsumen energi tertinggi kedua di dunia, melampaui Jepang meskipun masih dibawah Amerika Serikat, impor minyak dan *energy security* untuk pasokan kebutuhan minyak dalam negeri telah menjadi isu krusial di Tiongkok. Sebuah kerjasama dengan berbagai negara untuk mengeskplorasi energi adalah salah satu bentuk cara yang dilakukan oleh negara Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan energi mereka dan negara negara yang menjadi tujuan untuk bekerjasama dalam bidang hal ini adalah negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya energi yang besar, namun tidak mumpuni untuk mengelola sendiri kekayaan alam yang mereka miliki. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Tiongkok akan sebanding dengan meningkatnya permintaan energi yang cukup besar. Sekitar 72 persen kebutuhan energi Tiongkok sekarang ini masih ditutup dengan batu bara. Konsumsi atas minyak diperkirakan meningkat rata-rata 3,8 persen per tahun pada kurun 1996-2020, atau dari 3,5 juta bph (1996) menjadi 8,8 juta bph (2020). Sedangkan gas, peningkatan jauh lebih tinggi lagi yang disebabkan adanya upaya untuk mengalihkan konsumsi BBM ke gas yakni 11,7 persen per tahun, dari 0,7 triliun kaki kubik (TCF) tahun 1996 menjadi 9,5 TCF tahun 2020 (Ebel, 2007)

Seperti halnya negara – negara lain, sumber energi minyak Tiongkok tergantung pada negara – negara di Timur Tengah. Amerika memasok energi dari Timur Tengah sebesar 65% dan Jepang sebesar 80% sehingga menimbulkan ketergantungan yang signifikan. Namun, selain kawasan Timur Tengah yang tidak kondusif, kawasan ini juga dihuni oleh Amerika Serikat. Selain itu, Tiongkok sadar akan bahaya yang sering kali timbul pada penyaluran minyak impornya berasal dari Timur tengah yang melewati Selat Malaka

sehingga menganggap bahwa hal ini menyebabkan ketidakkokohan pada keamanan energinya. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Presiden Hu Jintao yang menyatakan bahwa 80% minyak Tiongkok melewati Selat Malaka namun banyak kekuasaan yang berusaha untuk mengendalikan selat tersebut (Haas, 2005). Sementara minyak dari Afrika Barat juga rawan akan keamanannya dimana Selat Hormuz dikenal memiliki keamanan yang rendah sehingga timbul kekhawatiran pada Tiongkok. Terlebih lagi bahwa 90% dari minyak impor Tiongkok dibawa oleh kapal dan hanya kurang dari 10% nya dibawa oleh tangker Tiongkok sendiri. Sehingga sebagai upaya untuk melakukan keamanan energi, sejak 1990 an Tiongkok telah melirik Asia Tengah. Sebagai konsumen minyak terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok mencanangkan prioritas yang besar pada bagaimana untuk dapat lebih mudah mendapatkan minyak dan gas di kawasan Asia Tengah.

Timur Tengah merupakan pusat penghasil minyak global. Oleh karena itu, minyak Timur Tengah menentukan hidup mati industri barat dan memberi pengaruh yang besar. Jumlah minyak Timur Tengah yang harus di impor barat jumlahnya besar. Eropa barat tergantung 3/5 atau sebanyak 20% dari kebutuhan minyaknya di *supply* oleh kawasan Asia Tengah. Sementara Amerika Serikat tergantung sebesar 1/7 bagian dan Jepang sebanyak 2/3 bagian dari semua keperluan minyaknya. Dengan meningkatnya industrialisasi di barat maka penggunaan minyak oleh negara-negara barat pun juga meningkat (Daniel, 1985). Untuk menutup kebutuhan pasokan dalam negeri, Tiongkok selama ini mengandalkan impor negara-negara Timur Tengah. Dari total penggunaan minyak mentah nasional sebesar 200 juta ton tahun 2000, sekitar 70 juta ton harus ditutup dari impor. Dari 70 juta ton minyak mentah ini, lebih dari 50 juta ton di antaranya berasal dari Timur Tengah (Karl, 2007).

Ketidakstabilan politik dan keamanan di Timur Tengah tentu menjadi momok setiap negara, hal itu disebabkan pasokan minyak ke negara mereka akan mengalami gangguan, sehingga industri mereka akan terganggu. Hal tersebut juga mempengaruhi Tiongkok sebagai negara industri yang maju. Oleh karenanya, Tiongkok berupaya mengamankan pasokan minyak untuk kelancaran industri dan perekonomian nasionalnya. Keberadaan Asia Tengah juga membuat Tiongkok berupaya untuk memperoleh sumber energi dari kawasan tersebut. Secara umum sendiri kondisi keamanan regional Asia Tengah sendiri dapat dikatakan sebagai daerah yang dalam keadaan sedikit berbahaya. Hal tersebut dikarenakan kondisi internal negara-negara yang berada di kawasan ini yang banyak menghadapi konflik antar negara maupun konflik dari internal negara mereka sendiri. Konflik-konflik yang terjadi di kawasan Asia Tengah ini sendiri bukan serta merta muncul pasca kemerdekaan yang mereka peroleh pasca runtuhnya Uni Soviet, melainkan warisan dari era dimana mereka masih tergabung kedalam kawasan Uni Soviet. Dengan komposisi etnis budaya yang sangat diversifikasi, kawasan Uni Soviet disatukan kedalam aspek politis dengan membagi area geografis Uni Soviet berdasarkan etnis-etnis yang bermukim di wilayah itu, kemudian memposisikan etnis Rusia sebagai etnis unggul yang disebarkan ke berbagai wilayah satelit Uni Soviet. Hal ini berbeda dengan kawasan Asia Tengah yang tidak dibagi oleh politik etnis Uni Soviet sehingga menimbulkan permasalahan yang muncul dengan runtuhnya Uni Soviet dimana sekelompok etnis yang bermukim di wilayah di luar negara menganggap bahwa wilayah tersebut merupakan rumah bagi etnis mereka (Julia, 2006).

Keamanan energi merupakan upaya untuk melindungi pengguna energi yang dapat mengancam pasokan energi sebagai akibat dari terorisme, kurangnya investasi dalam infrastruktur energy (Kirkham, 2016). Pengertian keamanan energi sering menekankan perlunya untuk menjamin pasokan yang cukup dan harga yang wajar. Definisi keamanan energi yaitu untuk mendapatkan pasokan energi yang cukup untuk mempertahankan kinerja ekonomi dan pertumbuhan dan memperluas orientasi kuantitatif untuk menjamin pasokan energi yang cukup dengan harga yang wajar dan stabil untuk mempertahankan pertumbuhan dan kinerja ekonomi (Ronald, 2010). Keamanan energi (*energy security*) merupakan sebuah konsep dimana sebuah negara mampu mempertahankan diri dan melakukan pembangunan dengan mengutamakan keamanan dan ketersediaan cadangan energi yang memadai dengan harga yang terjangkau, baik minyak ataupun variasi jenis

energi lainnya (Lee, 2010). Hal ini semakin penting dengan keadaan bahwa dinamika pergerakan ekonomi dan politik turut mempengaruhi suplai energi yang krusial bagi kegiatan berjalannya sebuah negara. Hal-hal yang dapat berdampak bagi keberlanjutan cadangan energi antara lain adalah ketersediaan cadangan energi, fluktuasi harga, ancaman terorisme, instabilitas domestik negara pengekspor energi, adanya perang, persaingan geopolitik, hingga peta energi oleh negara-negara besar, pengonsumsi energi dunia. Konsep keamanan energi pada awalnya dipahami sebagai ketersediaan pasokan energi dalam kualitas yang cukup dengan harga yang dapat dijangkau. Menurut Daniel Yergin, keamanan energi harus mencakup komponen lingkungan hidup dan keamanan fisik dari pasokan energi itu sendiri. Berdasarkan uraian konsep keamanan energi yang telah dijelaskan maka teori keamanan energi pada dasarnya merupakan teori yang lahir sebagai solusi permasalahan energi yang dihadapi suatu negara (Susan, 2007).

Berdasarkan pengertian dari Energy Information Administration (EIA), definisi pasokan energi mengacu pada persediaan minyak mentah (stok) yang diselenggarakan oleh pemerintah suatu negara serta industri swasta untuk tujuan memberikan keamanan ekonomi dan nasional. Suatu negara pun perlu untuk memiliki cadangan minyak strategis global (EIA, 2006). Pasokan energi suatu negara tidak hanya dilihat dari permintaan energi yang ada, namun adanya bukti cadangan yang seketika dapat digunakan ketika muncul keadaan peningkatan permintaan pasokan energi. Berdasarkan konsep keamanan energi yang telah dijelaskan, pasokan yang cukup merupakan komponen pertama yang menjadi fokus suatu negara. Banyak negara yang mengalami kekurangan pasokan minyak. Secara garis besar, kurangnya pasokan minyak suatu negara disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, ketidakseimbangan sebaran geografis antara wilayah yang kaya dengan sumber energi minyak dengan wilayah yang miskin dengan sumber energi minyak, dan adanya ketidakseimbangan antara diversifikasi energi dengan insentif harga (EIA, 2006).

Menurut Asia Pacific Energy Research Centre (APEREC), beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai kerangka untuk memahami *energy security* yang biasa disebut sebagai 'The 4 A's', antara lain: Pertama, Ketersediaan sumber daya energi (*Energy resource availability*), meliputi sumber daya energi konvensional, non-konvensional, dan terbarukan. Indikator *availability* dibatasi pada ketersediaan sumber daya energi minyak saja. Indikator ini mengacu pada jumlah pasokan sumber energi minyak dari sumber cadangan yang dikenal. Berangkat dari status Tiongkok sebagai net oil importer, sumber cadangan yang dimaksud adalah sumber minyak di luar negeri yang berasal kawasan-kawasan penghasil minyak dunia seperti Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tengah. Ketersediaan minyak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti infrastruktur eksplorasi dan pengilangan minyak, serta infrastruktur transportasi minyak dari sumber ke Tiongkok. Kedua, hambatan aksesibilitas (*Accessibility barriers*), selain ketersediaan sumber daya energi, kemampuan untuk mengakses sumber daya merupakan salah satu tantangan utama untuk mengamankan pasokan energi untuk memenuhi pertumbuhan permintaan di masa mendatang. Indikator *accessibility* digunakan untuk menggambarkan hambatan yang ada dalam upaya pengadaan sumber energi, termasuk hambatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber daya yang tersedia. Hambatan aksesibilitas pasokan energi meliputi faktor ekonomi, faktor politik, dan teknologi. Dalam kasus Tiongkok, hambatan aksesibilitas sumber daya minyak meliputi hambatan yang dapat bersumber dari geopolitik, kendala keuangan atau biasa disebut *cost*, rezim fiskal, dan kebutuhan akan infrastruktur utama dan penyebaran teknologi yang memadai. Kesulitan dalam mengakses sumber daya memiliki baik dimensi politik maupun fisik, yang menggambarkan kemungkinan tumpang tindih antara variabel *availability* dan *accessibility*. Ketiga, penerimaan lingkungan (*Environmental acceptability*), indikator ini menyangkut pada masalah penerimaan oleh lingkungan dan keselamatan yang muncul disebabkan oleh keberadaan sumber daya energi. Kecenderungan permintaan energi diperkirakan dapat meningkatkan dampak lingkungan yang berhubungan dengan energi. Dalam kasus Tiongkok, variabel ini dapat dilihat dari berbagai studi kelayakan yang dilakukan oleh Tiongkok sebelum mengeksplorasi sumber energi di suatu kawasan, serta kebijakan yang diterapkan oleh Tiongkok di kawasan penghasil minyak yang melibatkan

unsur-unsur lingkungan dan sosial. Keempat, keterjangkauan biaya investasi (*Investment cost affordability*). *Affordability* merujuk pada kemampuan konsumen untuk membayar jasa energi, modal, dan struktur biaya operasional untuk mengembangkan berbagai sumber energi. Dalam kasus Tiongkok, variabel ini dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan Tiongkok untuk mendapatkan sumber minyak dengan harga dan biaya pengembangan infrastruktur serta biaya transportasi minyak dari negara sumber ke Tiongkok yang terjangkau (APEREC, 2015).

Konsep Kerjasama Keamanan Regional juga menjadi hal yang penting dalam melakukan penelitian ini. Dalam melihat konsep keamanan regional ini maka sangat dekat kaitannya dengan teori organisasi regional dimana menggambarkan adanya arus yang menggabungkan berbagai negara – negara nasional menuju kesatuan yang lebih erat diantara negara - negara anggotanya (Buzan, 1991). Dalam studi kawasan regionalisme di definisikan sebagai formasi dari pengelompokan antar negara dalam batas suatu region dalam pengertian geografis. Namun dalam faktanya sekarang ini, regionalisme saat ini tidak saja didasari oleh pengelompokan geografis semata akan tetapi dapat didefinisikan berdasarkan kriteria sosial, politik, keamanan militer dan ekonomi. Sehingga kemudian muncullah pendefinisian secara politik, keamanan dan ekonomi. Suatu kawasan politik di definisikan sebagai region yang terdiri dari negara – negara yang memiliki sistem politik atau menjalankan politik luar negeri yang relatif sama. Sedangkan suatu region keamanan digambarkan dengan adanya kesamaan persepsi tentang ancaman sejumlah negara tertentu sehingga membutuhkan sebuah kerjasama bersama yang bersifat komprehensif dan kooperatif atas dasar kepentingan yang sama. Sementara region ekonomi digambarkan sebagai suatu region yang terbentuk dari pola perdagangan dan berbagai ikatan ekonomi lain yang secara intensif dan terus-menerus diantara negara – negara yang ada di dalamnya (Busan, 1991).

Untuk menggambarkan hubungan kerjasama keamanan regional dapat ditinjau dari berbagai pendekatan. Salah satu konsep yang hingga kini masih relevan digunakan sebagai rujukan adalah konsep keamanan regional yang di tulis oleh Barry Buzan. Menurut Buzan (1991), masalah keamanan regional dapat direfleksikan dalam konsteks keamanan secara individu yang saling berinteraksi dalam sistem politik internasional. Oleh karena itu, problematika keamanan regional merupakan akumulasi dari masalah nasional masing – masing negara yang menjadi tanggung jawab bersama secara menyeluruh sebagai konsekuensi pola ketergantungan keamanan internasional (*International security interdependence*).

Dalam konsep keamanan regional, Buzan (1991) juga mengemukakan tentang isu kompleks keamanan (*security complexes*) terutama di negara dunia ketiga, yang mana secara konseptual digambarkan bahwa kondisi keamanan regional sejumlah negara berkembang seringkali didasarkan pada pola – pola permusuhan / kebencian, ketakutan dan rivalitas dari pola – pola persahabatan, kepercayaan dan kerjasama. Demikian juga dengan isu kompleks keamanan juga menggambarkan pola – pola hubungan keamanan antar negara di kawasan. Lahirnya intensitas pola hubungan persahabatan dan permusuhan sesungguhnya dapat memberikan kesempatan bagi kepentingan – kepentingan kekuatan eksternal terhadap dinamika pola hubungan di kawasan. Sebuah Organisasi Regional tentunya akan membawa keuntungan bagi anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut. Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh diantaranya adalah mengurangi biaya atau *cost* dan meningkatkan kerjasama legitimasi diantara negara-negara yang tergabung dalam organisasi tersebut (Buzan, 1991).

Meningkatnya dinamika pola hubungan keamanan di kawasan akan banyak dipengaruhi oleh banyak aktor dalam kawasan, lahirnya sejumlah konflik regional, perbedaan persepsi diantara negara dalam kawasan, munculnya sejumlah konflik regional, perbedaan pandangan diantara negara kawasan tentang pentingnya mekanisme pengaturan keamanan dan pengaruh kekuatan eksternal dalam kawasan menjadi faktor determinan terbentuknya sebuah organisasi. Kebijakan energi Tiongkok sedemikian rupa dirancang untuk meningkatkan hubungan dengan negara- negara penghasil energi utama,

melindungi penyaluran energi dan membangun jaringan jalur minyak / *pipeline* dan gas alam yang mengalir di wilayah Asia Tengah.

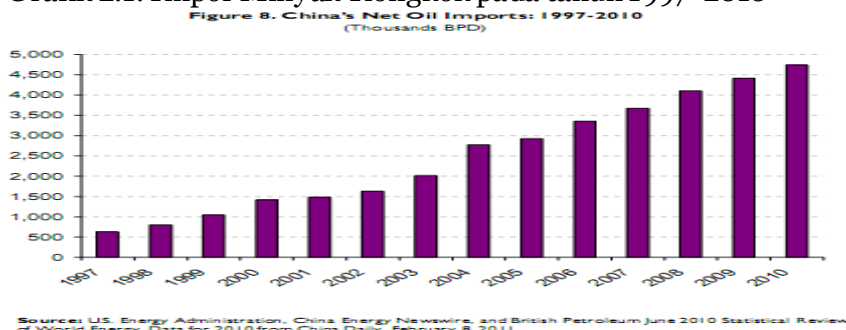
Sepak terjang organisasi regional dalam interaksi hubungan internasional telah menjadikan organisasi regional sebagai salah satu aktor yang berpengaruh dalam dialektika interaksi antar-aktor Hubungan Internasional. Lain hal nya dengan aktor negara yang pasti memiliki politik luar negeri yang kemudian menjadi kepentingan nasional sebuah negara untuk selalu dipegang dalam setiap proses interaksi internasional, organisasi regional tidak mempunyai politik luar negeri. Namun, organisasi regional bisa menjadi instrument atau media bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri negara-negara anggotanya.

Kelly-Kate S. Pease seorang professor dalam bidang politik, sejarah dan hubungan internasional menuliskan di dalam bukunya "*International Organization*" bahwa aliansi memang memberikan sumbangan dalam hal keamanan nasional, yaitu dengan memperkecil kemungkinan suatu negara akan diserang, dalam hal ini oleh negara sesama anggota aliansi (Pease, 2002). Namun, Kelly-Kate S. Pease (2002) menambahkan, walaupun suatu negara sudah bergabung dalam suatu aliansi, bukan berarti negara itu tidak perlu membangun powernya lagi. Menurutnya, sebuah organisasi internasional merupakan perpanjangan tangan dari negara hegemon. Negara hegemon akan menggunakan kekayaan dan *powernya* yang dominan untuk mendirikan organisasi internasional. Negara Hegemon juga akan memberikan insentif berupa perlindungan keamanan dan bantuan ekonomi. Dengan cara itu, negara hegemon secara tidak langsung membuat negara-negara anggota organisasi internasional menjadi bergantung padanya (Pease, 2002).

Kemunculan Tiongkok di pasar energi dunia telah meningkat pada beberapa deka de belakangan ini. Pada tahun 1985, Tiongkok masih dapat mencukupi kebutuhan energi dalam negerinya dan masih bisa mengekspor minyak mentah, produk – produk minyak dan juga batubara. Namun setelah tahun 1993, Tiongkok menjadi negara pengimpor minyak. Dan pada tahun 2003 konsumsi energi Tiongkok mengalami peningkatan yang dramatis. Tiongkok mengkonsumsi 29,2 persen batu bara dari kebutuhan batu bara dunia, 7 persen konsumsi minyak, 1,4 persen gas dan 10,5 persen konsumsi hidrokarbon (Pease, 2002).

Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan permintaan energi Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan merupakan faktor penting yang menjadi alasan utama permintaan energi di Tiongkok semakin tinggi. Antara tahun 1980 dan 2000 pendapatan per kapita Tiongkok mencapai 9,4 persen per tahun sama dengan tahun 2004. Meskipun untuk tahun – tahun kemudian pertumbuhan ekonomi menurun namun pembangunan tetap tumbuh dengan cepat. Sektor industri mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini memiliki dampak pada kebutuhan energi yang diperlukan. Pada tahun 2002 konsumsi energi di bidang industri manufaktur dan produksi barang jadi mencapai 69,3 % dari seluruh energi yang di konsumsi. Di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan peningkatan akan kebutuhan minyak bumi Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir:

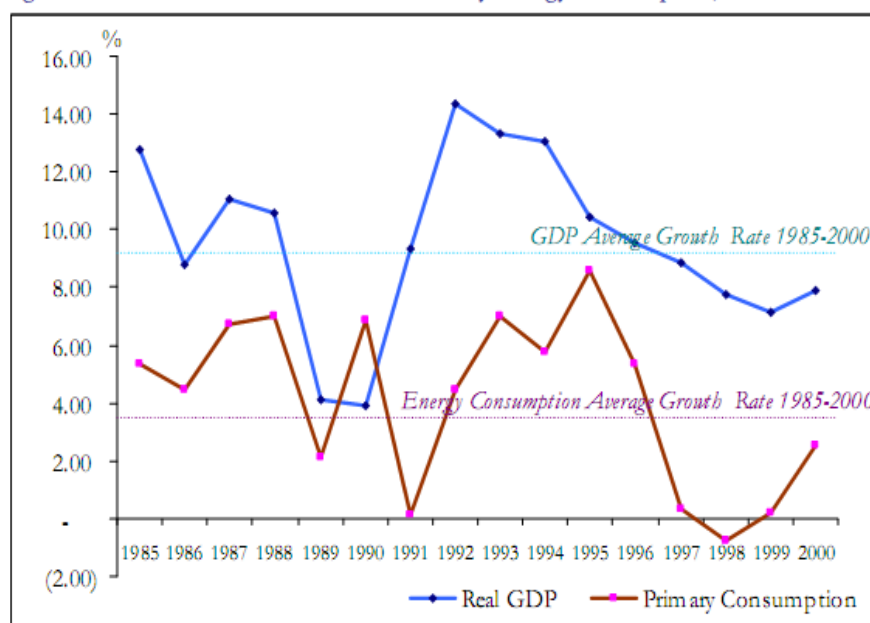
Grafik 2.1. Impor Minyak Tiongkok pada tahun 1997-2010



Merujuk pada grafik tersebut, digambarkan peningkatan konsumsi minyak Tiongkok dalam dua dekade terakhir. Terlihat jelas bahwa Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan dalam konsumsinya atas minyak. Selain itu, ada pengaruh langsung dari meningkatnya GDP Tiongkok dengan konsumsi minyak bumi Tiongkok, seperti yang terlihat dari grafik di bawah ini (APEREC, 2015):

Grafik 2.2 GDP Tiongkok dan Konsumsi Energi (1985-2000)

Figure 10 Growth in China's GDP and Primary Energy Consumption, 1985-2000



Merujuk pada grafik tersebut, terlihat bahwa laju pertumbuhan GDP Tiongkok akan sejalan dengan laju pertumbuhan konsumsi energi masyarakat Tiongkok, begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan memberikan dampak langsung terhadap konsumsi energi negara tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan minyak Tiongkok yang semakin meningkat dan juga kebutuhan atas gas alam yang juga tidak kalah pesat menyebabkan Tiongkok harus mendekati negara penghasil sumber-sumber minyak bumi dan gas alam ini.

Sejak dulu Tiongkok telah melirik Asia Tengah dalam hal perdagangan secara individu dan secara kawasan. Sejarah mengatakan bahwa dulu pusat perdagangan berada di wilayah Xinjiang atau di sebelah barat perbatasan seperti Jarkand, Samarkand, Urumuqi dan Kokand (Kort, 2004). Perdagangan antara Tiongkok dan Asia Tengah selalu dianggap penting dan menarik bagi kedua belah pihak seperti juga halnya saat ini. Perubahannya pada saat ini berubah dengan perdagangan minyak, gas alam, senjata dan infrastruktur, dimana minyak dangas menjadi fokus pada penelitian ini.

Problematika utama yang ditemukan di negara-negara Asia Tengah memiliki similiaritas karena merupakan hal-hal yang diwariskan pemerintahan Uni Soviet terhadap kawasan ini. Sebagai kawasan yang belum pernah merdeka dan tidak stabil kondisi politiknya, negara-negara Asia Tengah ditinggalkan kontrol pusat Moskow dengan warisan masalah-masalah yang serupa satu sama lain, yaitu tradisi politik otoritarian, terpuruknya ekonomi, tersebarnya kriminalitas dan korupsi, serta meningkatnya fundamentalisme Islam (Kort, 2004). Disamping itu, batasan geografis negara-negara Asia Tengah digariskan oleh Uni Soviet atas dasar pertimbangan etnis, dan pembagiannya dalam lima negara merupakan tujuan Josef Stalin saat itu untuk menahan potensi nasionalisme Islam atau nasionalisme pan-Turki di wilayah tersebut; demikian diupayakan dengan pembentukan birokrat-birokrat yang memiliki logika, kekuatan dan hak istimewa untuk mempertahankan tujuan tersebut.

Terdapat beberapa karakteristik dalam kawasan ini yang memperlihatkan perbedaan dengan kawasan-kawasan negara lain yang sebelumnya juga merupakan bagian dari kawasan Uni Soviet. Dipandang sebagai daerah kolonial pada kedua masa tersebut, kawasan Asia Tengah cenderung hanya dimanfaatkan untuk eksploitasi sumber daya alamnya (kawasan ini kaya akan minyak bumi dan gas), dan masyarakat yang tinggal di dalamnya cenderung diabaikan; khususnya pada masa pemerintahan pusat Uni Soviet berkuasa atas batasan geografis Asia Tengah, daerah ini merupakan daerah yang miskin dan tidak stabil keadaan politiknya. Selain masalah eksploitasi sumber daya, secara geografis, kawasan Asia Tengah merupakan kawasan yang kering, sehingga masalah air pun sempat menjadi akar konflik antara negara-negara di kawasan ini (Kort, 2004).

Negara-negara di Asia Tengah merupakan negara yang menganut sistem autokrasi. Kazakstan dan Uzbekistan pernah dipimpin oleh presiden-presiden yang berasal dari partai komunis. Demikian juga dengan Turkmenistan sampai dengan Presiden Saparmurat Niyazov yang meninggal pada akhir tahun 2006. **Kazakhstan** merupakan negara yang disebut sebagai pemimpin dari kawasan Asia Tengah. Secara ekonomi, Kazakstan mempunyai pendapatan perkapita (GDP) paling besar jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tengah lainnya. Bahkan Presiden Nursultan Nazarbayev pernah menyatakan pada bulan November 2006 bahwa Kazakstan berencana untuk menjadikan negara ini sebagai salah satu dari 50 negara kompetitif secara ekonomi (Kort, 2004). Kondisi ekonomi di Kazakhstan tidak dibarengi oleh kemajuan di bidang politiknya. Kekuasaan terbesar masih terkonsentrasi di tangan Presiden Nazarbayev dimana politisi-politisi yang tidak sejalan dengan pemerintahannya masih mendapatkan tekanan – terkanan. Nursultan Nazarbayev terpilih lewat pemilu presiden yang relatif bersih. Sayangnya sejumlah fenomena menunjukkan pemilu menjadi awal keresahan sosial di negara – negara sekitar seperti Georgia, Ukraina juga Kirgistan. Apalagi peristiwa ini dipandang para elit sebagai proses yang dimodali oleh Barat dan merupakan plot untuk mendukung rejim yang pro-Barat. Sementara itu pemilu juga dilihat sebagai ketidakberhasilan demokrasi yang diatur. Menjelang pemilu, media yang dikontrol negara mendorong agenda presiden. Kasus di Georgia, Ukraina juga Kirgistan menunjukkan bahwa begitu demokrasi yang diatur mulai gagal, rakyat mendapat energi untuk bergerak. Dan energi baru itu menjadi bencana bagi elite penguasa (Kort, 2004).

Tajikistan mempunyai prakondisi bagi kegoncangan politik. Ekonomi Tajikistan mengalami penurunan yang berlanjut, yang berdampak pada ribuan warga pergi keluar negeri untuk mencari kerja (Kort, 2004). Sementara Presiden Imomali Rakhmonov memperkuat kekuasaannya dengan mempersempit ruang kebebasan politik, sebagai persiapan menghadapi pemilu presiden. Perang saudara tahun 1992 – 1997 telah menunjukkan bahwa kekayaan minyak Tajikistan bukan menjadi jaminan bahwa ekonomi tidak akan hancur, kehilangan kekejaman dan penderitaan. Perang saudara juga memberi pelajaran bahwa tidak semua konfrontasi politik akan berakhir secara damai dan kondusif. Saat ini Tajikistan juga merupakan negara perlintasan produk opium dan heroin yang berasal dari Afghanistan menuju Eropa. Bahkan dana hasil penjualan obat terlarang tersebut digunakan menjadi pusat kekuatan informal yang berupaya menformalisasikan pengaruh mereka.

Turkmenistan memiliki sistem politik yang terkonsentrasi di bawah Presiden Saparmurat Niyazov. Beliau merupakan seorang presiden seumur hidup yang pribadinya dikultuskan dan ditampilkan di semua ranah publik. Dibawah kepemimpinannya, Turkmenistan dipandang sebagai negara di Asia Tengah yang paling represif dan terisolasi. Dengan kondisi tersebut, kudeta atau pertarungan bagi suksesi akan menjadi masalah besar pada saat pemimpin wafat. Perbedaan pendapat tidak dapat diterima di negara ini. Adanya batasan akses untuk mendapatkan informasi di negara ini menyebabkan negara ini dikenal sebagai salah satu negara dengan catatan hak asasi terparah di dunia. Masyarakat juga dibatasi untuk mendapatkan pendidikan, lulusan luar negeri pun tidak diakui dan ideologi yang dipakai oleh Niyazov mendominasi kurikulum yang digunakan (Kort, 2004). Namun untuk kepentingan Presiden Niyazov sendiri seperti untuk kesehatannya, ia menggunakan fasilitas kesehatan dari luar negeri sementara bagi

masyarakat biasa hal tersebut tidak diperkenankan. Pada tahun 2005 terjadi kejadian politik besar di Turkmenistan. Sejumlah pejabat yang dianggap terlibat dalam korupsi di bidang industri minyak dan gas dieliminasi. Peristiwa itu sendiri dipandang sebagai makin khawatirnya Presiden Niyazov menghadapi kemungkinan ancaman yang didukung oleh modal finansial yang kuat. Ancaman itu datang dari eselon tinggi kekuasaannya. Presiden Niyazov meninggal dunia pada bulan Desember 2006 akibat gagal jantung dan kekuasaannya digantikan oleh penggantinya Gurbanguly Berdimuhammedov yang memenangkan pemilu pada bulan Februari 2007 (Kort, 2004).

Uzbekistan dipandang sebagai negara yang tidak akan mengalami perubahan rezim yang disebabkan gagalnya demokrasi yang diatur. Hal tersebut disebabkan oleh pemilu presiden dan parlemen tidak memiliki pengaruh yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Rezim Presiden Islam Karimov dikatakan sebagai salah satu rezim yang paling represif di antara negara – negara Asia Tengah (Kort, 2004). Kebijakan ekonominya telah menimbulkan kemarahan dari masyarakatnya. Diperkirakan yang mungkin terjadi adalah perubahan lewat kekerasan sebagaimana yang ditunjukkan dalam kekerasan di Andijon pada tanggal 12 – 13 Mei 2005 (Kort, 2004). Kekerasan itu diawali dengan rasa kecewa akan keadaan ekonomi dan tidak berjalannya hukum. Sejak saat itu pemerintah berupaya untuk merubah keadaan hanya semata-mata untuk menenangkan pihak Barat yang banyak mengkritik kebijakannya dan melunakkan sanksi yang diberikan terutama oleh Uni Eropa (Kort, 2004).

Di **Kirgistan** ketidakstabilan politik terjadi sejak awal tahun 2005. Hal itu disebabkan oleh masalah *unfairness* dalam pemilu parlemen pada Februari dan Maret 2005. Rezim menghadapi ancaman perubahan atau revolusi gaya. Ancaman terhadap kepemimpinan Presiden Kurmanbek Bakiev dan Perdana Menteri Feliks Kulov dimlalui dengan peristiwa terbunuhnya tiga anggota parlemen. Dalam perkembangannya, demonstrasi menuntut pemerintah untuk mundur makin kerap kali dilakukan oleh masyarakat dengan terbunuhnya Tynychbek Akmatbaev, Ia merupakan saudara dari tokoh kriminal terkenal Ryspek Atmatbaev. Ryspek kemudian menjadi figur *public vocal*. Kirgistan dihadapkan dengan kekerasan politik, kerusuhan di penjara, perselisihan hak milik tanah, dan juga adanya ketidakpuasan sosial. Berbagai peristiwa itu menunjukkan bagaimana dunia kriminal bawah tanah bisa memainkan pengaruh pada politik tingkat tinggi dalam kondisi negara dalam keadaan tak memiliki *power*. Apalagi pemerintah semakin sulit mengontrol petugas keamanan, suatu hal yang meningkatkan prospek kekacauan dan kriminalitas (Kort, 2004).

Melalui penjelasan mengenai keadaan stabilitas dan *internal security complex* wilayah Asia Tengah tersebut, maka diperlukan sebuah wadah organisasi yang dapat dijadikan media oleh Tiongkok untuk mempermudah akses ke wilayah tersebut. SCO merupakan sebuah wadah yang mempertemukan Tiongkok dengan negara-negara di Asia Tengah ditambah Rusia, dimana melalui SCO tersebut Tiongkok dapat melakukan kontak langsung dengan wilayah Asia Tengah. Melalui SCO ini Tiongkok dapat menjalin kerjasama-kerjasama bagi kepentingan pemenuhan energi nasionalnya dengan mengurangi bahkan menghilangkan hambatan-hambatan *security complex* di wilayah Asia Tengah.

Setelah tiga dekade tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, urbanisasi, dan transformasi sosial, Tiongkok perlu untuk mengamankan sumber pasokan energi yang berkelanjutan dari tempat lain Selain Timur Tengah dan Afrika. Negara-negara di Asia Tengah merupakan target utama, terutama mereka dengan cadangan hidrokarbon besar dan deposit mineral, telah menjadi tujuan investasi Tiongkok, mengingat kedekatan geografis mereka dan kesempatan mereka juga menawarkan untuk mengamankan pasokan energi bagi Tiongkok, sehingga mengurangi ketergantungan Tiongkok pada *maritim rute*.

Namun ketika sebuah negara hendak menjalin kerjasama dengan negara-negara lain yang berada dalam satu regional lain, tentunya akan dihadapkan dengan hambatan-hambatan yang dikenal dengan istilah *security complex*. *Security complex* yang oleh Tiongkok adalah Asia Tengah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sumber daya energi nasional Tiongkok secara berkesinambungan, kemudahan dalam akses kontrol, mendorong stabilitas harga yang terjangkau di pasar energi, serta mengurangi segala bentuk kerentanan

terhadap kebutuhan energy, baik karena faktor eksternal maupun internal. Kemudian Tiongkok membutuhkan sebuah wadah berupa organisasi regional yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. SCO merupakan organisasi regional yang tepat dijadikan Tiongkok untuk mengambil keuntungan berkenaan dengan hambatan-hambatan tersebut. Tak sampai disitu, kebijakan Tiongkok terhadap negara anggota SCO melampaui pencarian hanya untuk sumber daya energi, tetapi juga sebagai pasar untuk barang industri- industrinya, dan semakin jauh wilayah SCO menjadi penghubung antara Tiongkok dengan negara-negara Barat.

Keterlibatan Pembangunan Di Negara- negara Anggota SCO merupakan langkah awal Tiongkok dalam membangun ekonominya di Asia Tengah. *Shanghai Cooperation Organization* merupakan mitra ekonomi yang sangat Strategis bagi Tiongkok melalui proyek-proyek ekstraksi sumber daya alam, investasi di bidang infrastruktur, dan pinjaman bunga rendah. Lebih dari 10% dari impor minyak dan gas Tiongkok sekarang datang dari Asia Tengah. Kecepatan hubungan dimana perdagangan telah diperdalam ini sangat mengejutkan, Ini telah membawa banyak manfaat untuk negara-negara Asia Tengah.

Shanghai Cooperation Organization (SCO) merupakan suatu organisasi internasional yang bergerak dalam segala bidang ekonomi, politik, keamanan maupun budaya. Dalam teori regionalisme suatu organisasi regional tidak dapat hanya melakukan fokus kerjasama dalam satu bidang saja, seperti halnya SCO dimana organisasi ini awalnya merupakan organisasi dengan konsep keamanan dan kemudian semakin lama berkembang menjadi organisasi yang bergerak kesegala bidang Seperti politik, ekonomi dan budaya. Tiongkok lebih mengutamakan SCO sebagai salah satu cara untuk mempermudah kerjasama ekonominya antara Tiongkok dengan negara-negara Anggota SCO. Tiongkok menyadari adanya keuntungan- keuntungan secara geopolitik akibat hubungannya antara negara-negara Asia Tengah melalui SCO. Dari dominasi Tiongkok didalam SCO, Tiongkok dengan mudah menjalin kerjasama dengan negara- negara Asia tengah lainnya. Sebagai contoh kerjasama dalam bidang energi yang sangat dibutuhkan Tiongkok. Beberapa negara Asia Tengah merupakan pengekspor dan sebagai jalur migas yang mempermudah Tiongkok dalam mengamankan pasokan energinya.

Terbukti setelah bergabung dengan SCO, Tiongkok dan anggota SCO lainnya bekerja pada 127 proyek bersama yang meliputi bidang perdagangan, investasi, adat istiadat, keuangan, perpajakan, transportasi, energi, pertanian, teknologi, telekomunikasi, kesehatan lingkungan dan pendidikan. SCO juga telah mendirikan tujuh panel spesialis untuk mempelajari dan mengkoordinasikan tindakan di bidang-bidang seperti bea cukai, transportasi, energi, dan telekomunikasi. Pada sela-sela pertemuan puncak pada tahun 2006, \$ 2 miliar untuk kontrak bisnis dan perjanjian pinjaman yang berhubungan, dengan penawaran yang melibatkan proyek jalan tol yang menghubungkan Tajikistan dan Uzbekistan, dua jalur listrik tegangan tinggi di Tajikistan, pabrik semen di Kyrgyzstan, dan stasiun pembangkit listrik tenaga air di Kazakhstan. Tujuan dari SCO dalam kerjasama ekonomi adalah untuk mewujudkan pasar bebas, jasa, modal, dan teknologi pada tahun 2020 di antara para anggotanya. Pemerintah Tiongkok telah memainkan peran dalam mengembangkan SCO dengan membangun kerja sama dengan negara-negara anggota untuk meningkatkan saling percaya dan kerja sama perdagangan. Tiongkok juga telah menyediakan senilai \$ 900.000.000 pinjaman untuk anggota lain dari SCO. Pinjaman dibuat dalam bentuk preferensial pembeli 'kredit untuk negara-negara anggota SCO yang membeli produk Tiongkok.

Wilayah SCO juga merupakan wilayah yang termasuk dalam *New Silk Road Plan* Tiongkok dimana negara-negara SCO juga merupakan pasar regional yang sangat menguntungkan bagi Tiongkok, dan lagi Wilayah SCO ini merupakan wilayah *Land Locked* yang menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara barat, seperti Eropa, Amerika Latin, dan negara-negara Afrika. Negara-negara SCO yang berada di Asia Tengah memiliki tiga keuntungan strategis bagi Tiongkok, Pertama sebagai negara pemasok energi yang paling aman bagi Tiongkok dan sebagai kawasan yang menjaga keamanan kebutuhan energi Tiongkok, Kedua sebagai sarana penghubung Tiongkok dengan negara- negara Eropa yang saat ini mulai mendatangkan produk-produk milik Tiongkok, dan Ketiga sebagai Pasar

regional bagi produk- produk industri Tiongkok. Maka dari itu Tiongkok membutuhkan SCO sebagai kawasan strategis yang selain menjadi penghubung dan juga merupakan partner energi dan perdagangan Tiongkok.

Referensi

Buku dan Jurnal

- Asia Pacific Energy Research Centre. 2007. *A Quest for Energy Security in the 21st Century: Resources and Constraints*, APERC. Tokyo.
- Buzan, Barry. 1991. *People, State and Fear; An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. New York: Harvester, Wheatsheaf.
- Daniel, Kaufman, Jeffrey S McKittrick dan Thomas J Leney. 1985. *US National Security*: Lexington Books.
- Ebel, Robert dan Menon Rajan. 2007. *Energy and Conflict in Central Asia and the Caucasus*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers
- Haas. 2005. *The Shanghai Cooperation Organization; Towards a Full Grown Security Alliance*.
- Julia, Lovell. 2006. *The Great Wall; China Against The World*. New York: Grove Press.
- Karl, F. Inderfurth. 2007. *Instability and Security in Central Asia: Foreign Policy Implications*. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik.
- Kirkham, Ksenia. 2016. *The formation of the Eurasian Economic Union: How successful is the Russian regional hegemony?* , dalam *Journal of Eurasian Studies*, Vol. 7.
- Michael, Kort. 2004. *Nations in Transition: Central Asian Republics*. New York: Facts on File, Inc.
- Pease, Kelly-Kate S. 2002. *International Organization: principles & issues*. New York: Prentice-Hall.
- Ronald, A. Morse. 2010. *Energy and Japan's National Security Strategy* dalam Ronald A. Morse (ed.).

Situs Internet

- Asia Pacific Energy Research Center. 2015. *Energy in China: Transportation, Electric Power, and Fuel Markets* [Online]. Diakses dari http://www.ieej.or.jp/aperc/pdf/CHINA_COMBINED_DRAFT.pdf pada tanggal 15 Oktober 2017.
- Buzan, Barry. 1991. *People, State and Fear; An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era* [Online]. Diakses dari <http://www.guardian.co.uk/business/datablog/2010/aug/03/us-chinaenergy-consumption-> data pada 4 Agustus 2017
- EIA International Energy Outlook. 2006. Diakses dari [http://www.eia/energyoutlook.publication/html](http://www.eia/energyoutlook/publication/html) pada tanggal 15 Oktober 2017.
- International Energy Agency. 2004. *Fact Sheet on IEA Oil Stocks and Emergency Response Potential* [Online]. Diakses dari http://www.fossil.energy.gov/programs/reserves/spr/IEA_factsheet_9-05.pdf, pada tanggal 4 Agustus 2017.